

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

Kabupaten Ende adalah sebuah Kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas kabupaten ini ialah 2.067,75 km² dan memiliki populasi sebanyak 270.763 jiwa (2020). Pusat pemerintahan atau ibukota kabupaten berada di Kota Ende. Ende memiliki banyak objek wisata, yaitu wisata alam seperti Kelimutu, wisata budaya, dan wisata sejarah. Sedangkan untuk letak astronomis, kabupaten Ende terletak pada 8°26'24,71" LS – 8°54'25,46" LS dan 121°23'40,44" BT – 122°1'33,3" BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Ende, yaitu:

- a) Batas Utara: Laut Flores
- b) Batas Timur: Kabupaten Sikka
- c) Batas Selatan: Laut Sawu
- d) Batas Barat: Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Ende terdiri dari 21 Kecamatan, 23 Kelurahan, dan 255 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 270.207 jiwa dengan luas wilayah 2.046,50 km² dan sebaran penduduk 132 jiwa/km².

Wilayah Kabupaten Ende ini termasuk juga dalam deretan jalur gunung berapi, sebut saja gunung berapi Iya yang memiliki ketinggian 637 mdpl, di mana letusan terakhirnya terjadi pada tahun 1969. Masih ada juga gunung berapi Mutubusa yang memiliki ketinggian 1.690 mdpl, di mana

terakhir kalinya tercatat memuntahkan lahar panas pada tahun 1938. Curah hujan di Kabupaten Ende tercatat lebih signifikan pada bulan November hingga bulan April. Dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.129 mm.

Perbedaan amplitudo suhu harian rata-rata juga tidaklah terlampau signifikan, berada dalam ambang 6,0 °c. Di mana suhu terpanas pada siang hari adalah 33 °c dan suhu udara malam hari memiliki suhu terendah pada titik 23 °c. Kelembaban nisbi Kabupaten Ende berada dalam kisaran rata-rata 85%.

2. Sejarah Pemerintah Kabupaten Ende

a) Bupati Kabupaten Ende dari tahun 1961 sampai sekarang:

1. Mauritus Gerardus Winokan (1961–1967)
2. H. Hasan Aroeboesman (1967-1973)
3. Herman Joseph Gadi Djou, Drs. Ekon. (1973–1978 periode ke-2 1978-1983)
4. Drs. Johannes Pake Pani (1983-1988 periode ke-2 1988-1993)
5. Letkol. Frans Gedowolo (1994-1999)
6. Drs. Paulinus Domi (1994–2004 periode ke-2 2004-2009)
7. Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si. (2009-2014)
8. Ir. Marselinus Y.W. Petu (2014-2019 periode ke-2 April 2019- meninggal Mei 2019)
9. Drs. Djafar H. Achmad, M.M. (2019-sekarang)

Sumber: (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende)

b) SKPD Yang Berada di Kabupaten Ende

SKPD yang berada di Kabupaten Ende terdiri dari badan, dinas, dan dinas lainnya. Badan dengan rincian sebagai berikut:

1. BKP3 Kabupaten Ende adalah Badan Ketahanan Pangan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah badan yang membantu gubernur/bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende adalah badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah

Dinas dan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende adalah dinas yang bertugas melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan. Mengembangkan dan meningkatkan tenaga keolahragaan. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pembinaan dan keolahragaan. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi olahraga.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

3. Dinas Pertanian Ende adalah dinas yang melakukan penyusunan kebijakan teknis dinas atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian.
4. Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah dinas yang salah satu fungsinya merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan
5. Dinas Sosial adalah dinas yang bertugas menyelenggarakan urusan teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah dinas yang memiliki fungsi salah satunya melakukan penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
7. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas untuk mengatur pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur pelayanan administrasi di bidang Perizinan.

8. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende adalah instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi dinas kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.
9. Dinas Pariwisata adalah dinas yang bertugas menyusun program dan pengendalian di bidang pariwisata, pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata, pemberian fasilitasi bidang pariwisata dan lainnya.
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Ende merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan. Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
13. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Ende adalah dinas yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenaga kerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
14. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende (SETWAN) memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
15. Inspektorat Kabupaten Ende adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

16. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende adalah dinas yang membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
19. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah perangkat daerah yang bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende adalah dinas yang memiliki tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua

- kegiatan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
21. Kesbangpol Kabupaten Ende adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerinta
 22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende adalah dinas yang bertugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak.
 23. Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Ende mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sumber: (<https://bkpsdm.endekab.go.id>)